

Analisis Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait *Governance by Trending* dalam Kasus Perubahan Keputusan PPATK tentang Rekening *Dormant*

Mayang Putri

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: maayangputrii@gmail.com

Abstract

This research analyzes the phenomenon of "governance by trending" within the context of the decision reversal by the Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) concerning its plan to block dormant bank accounts. This issue triggered significant negative public sentiment, compelling the institution to revise its policy. The study aims to identify the role of digital opinion in the policy process and its consequences for the quality of public policy formulation and the credibility of Indonesian government institutions. Employing a qualitative approach and utilizing the Multiple Streams Framework theory by John W. Kingdon, data collection was conducted through in-depth interviews selected via purposive sampling and documentary studies. The research found that social media virality acted as a collective policy entrepreneur and was the single determining factor in the policy change. Digital opinion successfully redefined the problem stream into an issue of social justice and instantly accelerated the political stream, ultimately forcing open a policy window. The consequence of this phenomenon is that the resulting policy was reactive, sacrificing the processes of deliberation and rationality in policy change. This also led to a decline in PPATK's credibility, as the institution was perceived as being more responsive to netizen pressure than to formal regulations. Although social media serves as an effective form of social control, its dominance risks undermining objectivity. This research recommends the integration of sentiment analysis mechanisms and a policy sandbox to ensure the quality of deliberation in the digital era.

Keywords: *Governance by Trending, Public Policy, Digital Public Opinion*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan hasil dari proses yang kompleks, strategis, dan politis yang disusun pemerintah sebagai respons terhadap persoalan masyarakat. Idealnya, tahap formulasi mengikuti model rasional melalui identifikasi masalah, penyusunan alternatif, dan pemilihan solusi terbaik

berdasarkan analisis yang efisien, efektif, dan optimal (Siregar & Sukiman, 2024). Pengambilan keputusan biasanya berlangsung bertahap, dipengaruhi kebijakan sebelumnya, tawar-menawar politik, dan kapasitas kognitif aktor kebijakan (Siregar & Sukiman, 2024). Tahap formulasi sangat menentukan keberhasilan implementasi dan evaluasi, sehingga kegagalan sering terjadi ketika prosedur tidak dijalankan secara menyeluruh.

Namun dalam praktiknya, proses kebijakan tidak selalu seideal model rasional. Formulasi kebijakan seharusnya melibatkan aktor negara dan non-negara dalam proses teknokratis serta negosiasi politik yang kompleks (Firda et al., 2025). Kebijakan dapat berubah mengikuti masukan baru, perubahan konteks, atau kesalahan implementasi. Meskipun tidak memiliki otoritas formal, aktor non-negara seperti kelompok kepentingan, komunitas ahli, dan masyarakat tetap memberikan kontribusi penting yang layak dipertimbangkan (Siregar & Sukiman, 2024). Dalam sistem demokrasi, tekanan politik dari luar institusi formal juga memiliki legitimasi kuat untuk memengaruhi arah kebijakan.

Perkembangan teknologi digital kemudian memperkuat dinamika tersebut, dan pengaruhnya semakin terlihat dalam dua dekade terakhir melalui hadirnya media sosial yang mengubah partisipasi publik dalam proses kebijakan secara signifikan. Media sosial telah berkembang dari media satu arah menjadi platform komunikasi yang setara yang memungkinkan partisipasi publik dan pembentukan opini kolektif (Muttaqin & Sriyono, 2021). Media sosial semakin diakui sebagai bagian penting dari proses perumusan kebijakan dan peningkatan partisipasi publik, terutama pada tahap penetapan agenda. Akibatnya, transformasi ini menghasilkan mekanisme baru untuk melacak kinerja pemerintah melalui keluhan dan respons masyarakat, yang berfungsi sebagai kontrol sosial (Rizqi et al., 2023). Analisis opini digital membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil (Muttaqin & Sriyono, 2021). Mobilisasi digital bahkan dapat menimbulkan masalah yang terabaikan menjadi prioritas pemerintah sekaligus menantang prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan objektivitas.

Oleh karena itu, untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana isu-isu yang dimobilisasi melalui media sosial ini dapat menembus sistem dan masuk ke dalam agenda pemerintah, penelitian ini menggunakan teori *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John W. Kingdon (1984) sebagaimana dikutip dalam Islamy (2025) sebagai pisau analisis utama. *Multiple Streams Framework* menjelaskan bahwa penetapan agenda terjadi melalui pertemuan tiga arus: Arus Masalah, yaitu kondisi yang diakui sebagai masalah publik; Arus Kebijakan, yaitu ide dan solusi yang dikembangkan komunitas kebijakan; serta Arus Politik, yaitu faktor eksternal seperti opini publik, perubahan pemerintahan, dan dukungan kelompok kepentingan (Alfathon et al., 2023; Islamy, 2025). Setelah ketiga arus ini bertemu, terbentuk Jendela Peluang Kebijakan (*Policy Window*). Pengusaha Kebijakan atau *Policy Entrepreneur*, menggunakan kesempatan ini untuk mendorong masalah-masalah tertentu untuk masuk ke agenda kebijakan. Kerangka teori ini sesuai dengan situasi di Indonesia, di mana tekanan publik

dan faktor politik sering menjadi faktor utama dalam mempercepat proses penetapan agenda (Firda et al., 2025).

Meskipun *Multiple Streams Framework* memberikan landasan teoritis, fenomena yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya dinamika baru yang menantang kualitas proses perumusan kebijakan, yang dalam penelitian ini disebut sebagai *governance by trending*. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika perubahan atau penetapan kebijakan publik terdorong, dipengaruhi, bahkan dipaksakan oleh isu-isu viral di platform digital. Fenomena tersebut pada dasarnya mempercepat Arus Politik (*The Political Stream*), karena opini publik digital bertindak sebagai aktor penting yang dapat membuka Jendela Peluang (*Policy Window*) secara cepat dan mendorong penetapan agenda pemerintah (Alfathon et al., 2023). Tekanan eksternal dari banyaknya unggahan, komentar, atau reaksi negatif di media sosial juga dapat memengaruhi proses perumusan kebijakan dan memaksa pembuat kebijakan untuk mengambil atau mengubah keputusan (Fadlan et al., 2020). Kondisi ini berisiko mengabaikan kajian rasional dan prosedur teknokratis, sehingga keputusan diambil secara reaktif untuk meredam *public mood* yang fluktuatif, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas kebijakan serta melemahkan prinsip *rule of law*.

Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk dikaji ketika diterapkan pada kasus konkret yang menunjukkan bagaimana tekanan opini publik digital mampu membentuk arah kebijakan secara cepat. Alasan pemilihan isu ini berangkat dari sebuah kasus yang jelas mencerminkan dinamika *governance by trending*, yakni rencana pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK. Secara legal, kebijakan tersebut dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam penipuan, pencucian uang, dan perjudian online, sehingga sesuai dengan model rasional dan berfokus pada arus masalah kejahatan siber. Namun, respons publik sejak awal menunjukkan penolakan kuat, terutama karena kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi kerugian bagi pemilik rekening pasif. Reaksi negatif ini menandakan munculnya masalah baru di masyarakat dan mempercepat tekanan dalam arus politik (*the political stream*).

Untuk memperkuat analisis, observasi awal melalui kajian sentimen publik di ruang digital menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang cukup serius. Laporan mengenai respons masyarakat atas isu pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK berdasarkan data dari Drone Emprit mencatat bahwa sekitar 81% dengan 8.430 *mentions* percakapan di media sosial didominasi sentimen negatif disertai emosi frustrasi, keterkejutan, dan kecemasan (Fahmi, 2025). Keresahan ini dipicu minimnya sosialisasi, ketidakjelasan definisi kebijakan, serta kekhawatiran bahwa rekening masyarakat kecil akan terdampak secara tidak proporsional. Analisis media tersebut diperkuat oleh wawancara awal dengan seorang informan yang mengalami pemblokiran rekening berisi dana pendidikan anaknya, sehingga menimbulkan kecemasan yang signifikan. Informan tersebut meyakini bahwa perubahan keputusan PPATK terutama didorong oleh derasnya opini publik yang viral di media sosial, karena penyebaran informasi dan komentar negatif membuat pemerintah merasa perlu

segera merespons. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat media sosial sebagai kekuatan dominan yang mampu mengarahkan perubahan kebijakan, sekaligus menimbulkan persepsi bahwa keputusan pemerintah tidak sepenuhnya berbasis kajian mendalam, melainkan tekanan opini publik. Fenomena inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang, pertimbangan teoritis *Multiple Streams Framework* (MSF), dan observasi awal tersebut, terdapat dua persoalan utama yang perlu dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan artikel ilmiah ini. Pertama, bagaimana dinamika opini publik di media sosial memengaruhi perubahan keputusan PPATK terkait rencana pemblokiran rekening *dormant*? Kedua, apa konsekuensi fenomena *governance by trending* bagi kualitas perumusan kebijakan publik dan kredibilitas lembaga pemerintah di Indonesia?. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Analisis Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait *Governance by Trending* dalam Kasus Perubahan Keputusan PPATK tentang Rekening *Dormant*". Dengan menerapkan kerangka teori *Multiple Streams Framework* dari Kingdon, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam persepsi pengguna media sosial terhadap fenomena *governance by trending*, khususnya dalam konteks percepatan arus politik (*the political streams*).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menelusuri dampak *governance by trending* terhadap mutu kebijakan publik serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah di Indonesia dan sekaligus memberikan kontribusi teoretis mengenai peran media sosial sebagai kekuatan utama dalam arus politik (*the political streams*) kebijakan publik masa kini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif tanpa melibatkan data dan angka (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika opini publik serta konteks kebijakan yang dikaji. Sumber data terbagi menjadi dua jenis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu individu yang aktif di media sosial, mengikuti isu pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK serta informan yang menjadi korban langsung dari rencana pemblokiran rekening *dormant* tersebut. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumentasi berita online, tangkapan layar (*screenshot*) komentar publik di media sosial, serta jurnal dan literatur akademik yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperkaya perspektif penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data untuk menyeleksi informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur, serta penarikan kesimpulan melalui identifikasi

pola dan verifikasi temuan guna memastikan validitas penelitian (Sugiyono, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

A. Kekuatan Opini Publik Digital sebagai Akselerator Arus Politik

Hasil penelitian menunjukkan konsensus yang mutlak di antara seluruh informan, bahwa opini yang terbentuk dan menjadi *trending* di media sosial adalah faktor penentu utama, bahkan satu-satunya yang memaksa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengubah atau membatalkan rencana kebijakan pemblokiran rekening *dormant*/pasif. Mayoritas informan secara tegas menyatakan bahwa “mustahil pemerintah bertindak cepat tanpa adanya viralitas” dan berpandangan bahwa PPATK bertindak karena “takut pada netizen” atau “mengikuti arus netizen” bukan berdasarkan kajian teknokratis baru.

Setiap informan secara konsisten mengidentifikasi sifat sentimen yang mendominasi ruang digital saat isu ini menjadi *trending*. Sentimen tersebut digambarkan sebagai negatif, emosional, dan kritis. Karena kebijakan awal PPATK ditujukan untuk rekening masyarakat kecil yang memiliki dana darurat atau tabungan jangka panjang yang jarang digunakan, informan merasa kebijakan tersebut “tidak adil”, “keterlalu”, dan “tidak punya hati”.

Skala tekanan opini publik yang menjadi faktor penentu perubahan kebijakan ini diperkuat oleh analisis sentimen digital. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 81% percakapan publik terkait isu pemblokiran rekening dormant didominasi oleh sentimen negatif, yang menunjukkan tingginya tingkat frustrasi dan kecemasan publik.

Kekhawatiran pribadi mendominasi perasaan negatif, seperti yang ditunjukkan oleh pengamatan visual melalui *screenshot* komentar netizen di berbagai platform online (Gambar 1). Tekanan yang ditunjukkan publik melalui komentar tersebut kemudian memicu intervensi dari aktor formal di luar lembaga eksekutif, seperti DPR, yang turut mendesak agar kebijakan tersebut ditinjau ulang, sehingga secara tidak langsung memaksa PPATK mengambil respons cepat.



Gambar 1. Sentimen Negatif Netizen Terhadap Kebijakan PPATK di Media Sosial

B. Kualitas Kebijakan dan Sifat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam hal kualitas kebijakan yang dihasilkan, pola dominan yang ditunjukkan oleh delapan dari sembilan informan menunjukkan bahwa keputusan akhir PPATK untuk menunda atau membatalkan rencana pemblokiran rekening adalah keputusan reaktif daripada hasil kajian yang mendalam. Mereka mengklaim bahwa pemerintah terlihat "buru-buru" dalam membuat keputusan hanya untuk "membuat rakyat tenang sebentar" atau "takut pada netizen" daripada mengikuti proses pembuatan kebijakan yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan kebijakan dianggap belum sempurna dan tidak sesuai dengan prinsip rasionalitas. Kebijakan yang diubah dengan cepat ini melanggar kepentingan rakyat kecil, menurut informan, dan "melanggar HAM dan tidak rasional."

Berdasarkan hasil penelitian, hanya ada satu informan yang berpandangan positif, namun alasan diberikan bersifat eksepsional, yaitu kebijakan awal PPATK dianggap "sangat buruk" sehingga perubahan apa pun yang dipaksa oleh publik pasti dianggap lebih baik. Pandangan ini tidak membenarkan proses *governance by trending* sebagai proses demokrasi yang ideal, melainkan hanya sebagai respons terhadap kebijakan awal yang dinilai gagal total.

Untuk melengkapi analisis kualitas kebijakan, penelitian ini menemukan adanya korelasi antara persepsi publik (informan) dan pendapat pakar kebijakan publik yang dipublikasikan di media, yang menunjukkan bahwa kebijakan PPATK "kurang matang". Menurut pakar dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, kurangnya kematangan ini ditunjukkan oleh kurangnya proses komunikasi publik yang efektif. Ini mendukung klaim informan bahwa kebijakan awal "tidak rasional" dan "tanpa sosialisasi yang memadai".

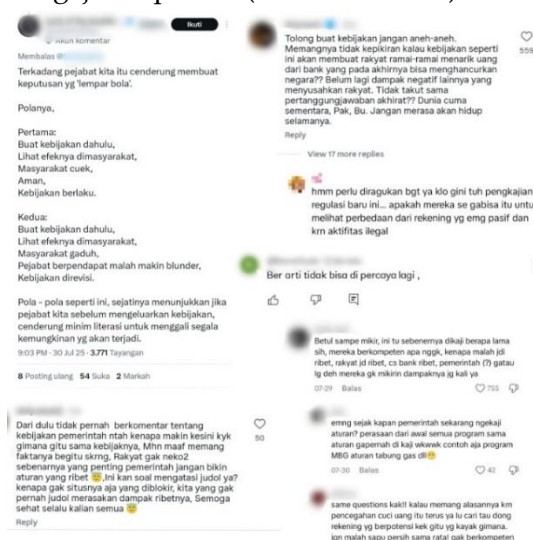
Pakar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ayif Fathurrahman, S.E., S.E.I., M.Si, menyoroti konsekuensi fatal yang lebih luas, yaitu bahwa *polectic* pemblokiran rekening *dormant* “bisa memicu krisis keuangan (*bank run*)” jika masyarakat secara serentak menarik dana mereka karena panik. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan PPATK tidak hanya bermasalah dari sisi komunikasi, tetapi juga memiliki potensi risiko sistemik yang tidak dipertimbangkan secara serius oleh lembaga.

Dengan demikian, hasil penelitian menggarisbawahi adanya risiko besar terhadap kualitas kebijakan, di mana tekanan media sosial dapat mengesampingkan kajian teknokratis, menyebabkan proses formulasi menjadi rentan terhadap faktor emosi dan tekanan politik jangka pendek.

C. Kredibilitas Lembaga dan Dilema Demokrasi

Semua informan setuju bahwa kasus perubahan kebijakan yang tersebar luas di media sosial telah menurunkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap PPATK. Lembaga dianggap “plin-plan”, “tidak profesional”, dan “sering berubah”, menciptakan persepsi bahwa lembaga pemerintah “lebih takut netizen daripada aturan” dan terlihat baru bertindak setelah mendapat perhatian dari publik. Pola respons reaktif ini menyebabkan kepercayaan yang buruk bahwa kebijakan dapat diubah hanya karena intensitas emosi daripada argumen substantif. Setiap kebijakan baru selalu dapat mengalami serangan balik digital yang masif, sehingga pengambilan keputusan yang penting dapat menjadi tidak stabil.

Temuan ini diperkuat oleh analisis visual terhadap komentar netizen yang menunjukkan adanya kritik tajam dan tuduhan bahwa pejabat cenderung membuat keputusan yang “lempar bola” dan menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan adanya pola pembuatan kebijakan yang sering direvisi setelah mendapatkan gejolak publik (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Kritik Netizen tentang Perilaku Pejabat ‘lempar bola’ dalam Kebijakan PPATK

Temuan ini secara keseluruhan menguatkan premis bahwa dinamika opini publik digital dalam kasus ini berperan ganda: menjadi mekanisme partisipasi yang cepat, sekaligus menjadi ancaman terhadap stabilitas dan rasionalitas pengambilan keputusan kebijakan publik.

Pembahasan

A. Analisis Konvergensi Arus dalam Perubahan Keputusan PPATK

Dengan menggunakan *Multiple Streams Framework*, yang menjelaskan bahwa tiga arus independen (arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik) bertemu di dalam Jendela Peluang (*Policy Window*) untuk menghasilkan kebijakan, masalah pertama tentang dinamika opini publik di media sosial yang memengaruhi keputusan PPATK dapat dianalisis secara menyeluruh (Islamy, 2025). Dalam fenomena *governance by trending* media sosial tidak hanya memengaruhi, tetapi juga mengontrol arus politik secara signifikan, menjadikannya lebih kuat dan tidak dapat diprediksi.

Temuan penelitian yang menunjukkan konsensus mutlak bahwa opini media sosial adalah faktor penentu perubahan kebijakan (Siregar & Sukiman, 2024), menegaskan bahwa di era digital, opini publik tidak lagi hanya menjadi salah satu komponen arus politik, melainkan berubah menjadi Pengusaha Kebijakan (*Policy Entrepreneur*) kolektif yang dominan. Pengusaha kebijakan dalam hal penelitian ini adalah individu atau kelompok yang berinvestasi waktu dan energi untuk menyatukan ketiga arus.

1. Arus Masalah (*The Problem Stream*)

Pada tahap awal, PPATK menempatkan isu pemblokiran rekening dormant ke dalam arus masalah dengan formulasi yang bersifat rasional dan teknokratis. Isu tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan keamanan sistem keuangan, khususnya dalam mencegah kejahatan siber serta menjaga integritas arsitektur finansial nasional. Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF), definisi awal ini mencerminkan upaya birokrasi untuk membingkai permasalahan secara objektif sehingga dapat membuka ruang bagi kebijakan yang berdasar pada logika efektivitas, efisiensi, dan keamanan finansial.

Namun, dinamika yang terjadi di ruang digital menunjukkan bahwa persepsi publik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap konstruksi arus masalah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa opini publik yang berkembang di media sosial secara substansial mendistorsi dan mendefinisikan ulang isu rekening *dormant*. Narasi teknokratis yang dibangun PPATK bergeser menjadi narasi moral dan sosial, di mana masyarakat memaknai kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap keadilan bagi kelompok rentan, terutama rakyat kecil yang dianggap paling mungkin terdampak oleh pemblokiran rekening *dormant*. Transformasi isu ini menunjukkan bahwa viralitas digital tidak hanya memperluas ruang diskursus, namun juga mampu memberikan bobot emosional yang melampaui argumentasi rasional lembaga negara.

Redefinisi yang dipicu oleh arus opini publik tersebut menggeser arah arus masalah sehingga isu yang awalnya bersifat teknis (kejahatan siber) menjadi krisis kepercayaan publik yang menuntut respons segera. Netizen berperan layaknya aktor kolektif yang menyerupai pengusaha kebijakan (*policy entrepreneur*) dengan kemampuan untuk memobilisasi perhatian publik, mengarahkan interpretasi masalah, dan menekan pemerintah untuk mengubah pendekatan kebijakan. Dengan demikian, tekanan digital ini berhasil menempatkan isu pemblokiran rekening *dormant* bukan sekadar sebagai kekurangan administratif, melainkan sebagai persoalan legitimasi institusional yang memerlukan penanganan cepat dan sensitif terhadap persepsi publik (Siregar & Sukiman, 2024).

2. Arus Kebijakan (*The Policy Stream*)

Dalam kerangka *Multiple Streams Framework*, arus kebijakan seharusnya menjadi arena di mana berbagai alternatif solusi yang teknis, layak, dan telah melalui proses pengujian yang ketat dipertemukan. Arus ini idealnya berfungsi sebagai penyaring ide menyeleksi opsi kebijakan berdasarkan kelayakan teknis, nilai-nilai yang dapat diterima, serta potensi efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah. Namun, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa dalam kasus pemblokiran rekening *dormant*, arus kebijakan berada dalam kondisi lemah dan belum berkembang secara memadai.

Temuan kualitatif, baik dari pakar dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo maupun pendapat mayoritas informan, secara konsisten menggambarkan langkah PPATK sebagai kebijakan yang “belum matang,” “kurang rasional,” dan “minim sosialisasi” (Grehenson, 2025). Evaluasi ini menegaskan bahwa alternatif solusi yang diajukan PPATK tidak melalui proses seleksi, verifikasi, maupun pengujian kebijakan yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum suatu opsi masuk dalam arus kebijakan. Dengan kata lain, ide kebijakan yang dibawa PPATK tidak memenuhi standar kedalaman analitis maupun ketepatan prosedural yang diperlukan untuk membentuk kebijakan publik yang komprehensif. Kelemahan substantif ini semakin terlihat ketika arus kebijakan gagal mengantisipasi risiko-risiko makro dan efek sistemik yang mungkin muncul. Kritik dari pakar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ayif Fathurrahman, S.E., S.E.I., M.Si, mengenai potensi *bank run* memperlihatkan bahwa aspek fundamental dalam manajemen stabilitas keuangan tidak memperoleh perhatian yang memadai (Yogyakarta, 2025). Ketidadaan pertimbangan terhadap risiko sistemik tersebut menunjukkan bahwa arus kebijakan tidak menjalankan fungsi utamanya sebagai ruang penilaian kelayakan kebijakan secara komprehensif.

Imaturitas tersebut menghasilkan situasi di mana arus kebijakan tidak mampu menawarkan alternatif solusi yang kuat secara teknis. Pada akhirnya, hanya tersisa satu opsi reaktif, yaitu pembatalan kebijakan. Pilihan ini bukan diambil karena melalui pertimbangan rasional yang optimal sebagaimana dikemukakan dalam literatur yang menekankan bahwa kebijakan ideal harus

melalui proses yang komprehensif (Septiana et al., 2023). Sebaliknya, keputusan tersebut diambil karena PPATK berada dalam tekanan politik dan tuntutan publik yang mendesak. Kondisi ini menegaskan bahwa arus kebijakan gagal menjalankan perannya dalam menyediakan pijakan analitis dan teknis bagi pembuat kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih bersifat responsif terhadap tekanan politik ketimbang berlandaskan penilaian yang matang.

3. Arus Politik (*The Political Stream*)

Keputusan yang dibuat oleh PPATK dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan opini publik di media sosial. Temuan penelitian menegaskan bahwa opini di media sosial tidak lagi hanya menjadi salah satu komponen arus politik, melainkan berubah menjadi Pengusaha Kebijakan (*Policy Entrepreneur*) kolektif yang dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa opini publik digital memberikan tekanan politik yang datang dari luar institusi formal dan bahkan lebih kuat daripada mekanisme politik konvensional. Dalam konteks *Multiple Streams Framework*, arus ini sangat penting ketika opini publik menjadi kekuatan yang dapat mengatur kebijakan, menggantikan dominasi aktor politik konvensional.

Fenomena *governance by trending* memperjelas bagaimana opini publik digital mengambil posisi sebagai Pengusaha Kebijakan (*Policy Entrepreneur*) kolektif yang mengakselerasi arus politik secara non-linear (Siregar & Sukiman, 2024). Tidak ada proses deliberatif formal, melainkan ledakan diskursus spontan yang membentuk tekanan politik dalam tempo cepat. Data Drone Emprit (2025) menunjukkan bahwa 81% sentimen publik bersifat negatif, yang menciptakan konsensus emosional yang sangat kuat. Sentimen ini bukan hanya menghasilkan kritik, tetapi membentuk arsitektur tekanan politik yang sepenuhnya didorong oleh ritme algoritma dan pola keterlibatan digital. Dengan demikian, viralitas tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi membentuk konstruksi politik yang memaksa lembaga negara untuk merespons secara langsung.

Kekuatan mobilisasi massa digital yang muncul dari konsensus negatif tersebut menjadi alat kontrol sosial yang efektif dan tidak dapat diabaikan. Tekanan dari dunia digital tidak hanya memengaruhi PPATK tetapi juga mendorong lembaga politik formal, seperti DPR, untuk segera menanggapi masalah tersebut (Rizqi et al., 2023). PPATK harus mengubah kebijakannya karena arus politik menjadi lebih cepat dan tekanan publik di media sosial meningkat. Ini menunjukkan bahwa opini digital telah berkembang menjadi kekuatan penentu agenda yang memengaruhi keputusan lembaga negara. Pada akhirnya, dominasi opini publik di dunia digital akan menyebabkan kebijakan publik ditentukan oleh ritme dan tekanan masyarakat yang bergerak melalui media sosial.

Konvergensi tiga arus dalam kasus ini dipaksa terbuka secara instan oleh viralitas, yang secara efektif menjawab bagaimana opini publik di media sosial memengaruhi keputusan PPATK. Arus politik yang terakselerasi sangat kuat bertemu dengan arus masalah yang telah didefinisi secara emosional.

Pertemuan ini menciptakan jendela kebijakan (*policy window*) yang bersifat krisis dan instan (Alfathon et al., 2023). Tekanan yang dihasilkan oleh jendela kebijakan yang dipaksakan ini memaksa PPATK untuk segera merespons. Keputusan PPATK untuk mengambil solusi arus kebijakan yaitu pembatalan yang merupakan respons langsung terhadap urgensi politik yang diciptakan oleh opini digital. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik di media sosial memengaruhi keputusan PPATK secara langsung melalui akselerasi arus politik, yang mendominasi arus masalah dan memaksakan solusi reaktif dari arus kebijakan, menghasilkan perubahan keputusan yang cepat dan signifikan.

B. Konsekuensi Reaktifitas terhadap Kualitas Kebijakan

Temuan mengenai keputusan PPATK yang dinilai reaktif oleh mayoritas informan (delapan dari sembilan) mengindikasikan adanya kelemahan signifikan dalam arus kebijakan (*the policy stream*) PPATK, yang pada gilirannya menyebabkan kegagalan dalam proses deliberasi yang tenang. Reaktifitas ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas perumusan kebijakan publik:

Pertama, mengorbankan rasionalitas demi kecepatan. Kebijakan ideal harus didasarkan pada model rasional yang menekankan kajian mendalam, efisiensi dan optimalisasi. Namun, temuan menunjukkan bahwa keputusan PPATK lebih dekat pada model inkremental yang dipengaruhi oleh tawar-menawar politik, di mana media sosial menjadi instrument tawar-menawar tersebut. Ketika jendela kebijakan (*policy window*) dipaksa terbuka oleh viralitas, tekanan waktu (Sapitri, 2021) membuat lembaga tidak memiliki ruang untuk melakukan kajian ulang teknokratis yang diperlukan. Keputusan yang dihasilkan, yaitu menunda kebijakan tanpa Solusi pengganti yang matang, dianggap sebagai tindakan reaktif yang hanya bertujuan meredam situasi, bukan memperbaiki kebijakan secara fundamental.

Kelemahan ini selaras dengan teori *Multiple Streams Framework* bahwa arus kebijakan yang belum matang atau kurang berkembang tidak akan mampu menyediakan solusi yang optimal ketika arus politik memuncak. Akibatnya, PPATK terpaksa memilih opsi yang paling cepat (menunda atau membatalkan), yang merupakan ciri khas kegagalan arus kebijakan untuk beroperasi secara independen dari tekanan politik.

Kedua, rendahnya kualitas kebijakan awal. Informasi yang sangat kritis terhadap kebijakan awal PPATK menunjukkan bahwa implementasi dan sosialisasi kebijakan telah menimbulkan masalah sejak awal. Dalam hal ini, kekuatan media sosial berfungsi sebagai mekanisme korektif yang kejam, mereka memaksa perubahan bukan karena PPATK menjadi rasional secara tiba-tiba, tetapi karena kebijakan yang tidak efektif memicu reaksi balik yang besar. Ini sejalan dengan gagasan bahwa keluhan masyarakat di platform digital adalah cara baru untuk mengawasi kinerja lembaga pemerintah (Rizqi et al., 2023). Kebijakan awal menjadi lebih buruk, jadi kebijakan akhir lebih baik. Namun, proses ini masih dianggap tidak sehat karena menunda proses pertimbangan yang seharusnya terjadi sebelum kebijakan diumumkan (Prawira et al., 2022).

C. Dampak pada Kredibilitas Lembaga dan Dilema Demokrasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika kebijakan dalam kasus PPAK memperlihatkan pola pengambilan keputusan yang semakin terpengaruh oleh intensitas opini publik digital. Respons kebijakan tidak lagi hanya bertumpu pada kajian teknokratis, tetapi juga pada tekanan emosional yang berkembang cepat di media sosial. Pergeseran ini menandakan bahwa viralitas mulai berperan sebagai variabel penentu dalam proses politik, sehingga mengubah hubungan antara lembaga negara dan publik dalam konteks legitimasi kebijakan.

Konsekuensi yang signifikan dari keputusan reaktif adalah temuan bahwa kredibilitas PPAK menurun karena dianggap sebagai "plan-plan" dan "hanya bertindak jika viral". Penurunan kredibilitas ini merupakan dampak sistemik dari dominasi arus politik yang terakselerasi, di mana lembaga terpaksa mengorbankan integritas teknokratisnya demi merespons tuntutan *policy entrepreneur* kolektif. Karena lembaga terlihat tunduk pada tekanan netizen, informan percaya bahwa lembaga kehilangan integritas dan autonominya. Ini mendukung gagasan bahwa lembaga pemerintah beralih dari strategi komunikasi konvensional ke strategi digital karena melihat keuntungan besar dalam menetapkan kebijakan (Latifah et al., 2022). Namun, mereka gagal mengendalikan kemungkinan bahwa bergantung pada viralitas dapat merusak reputasi profesional mereka.

Tiga informan melihat *governance by trending* sebagai cara yang sehat untuk mengontrol masyarakat dan alternatif yang baik untuk demonstrasi langsung, menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat. Ini sejalan dengan fungsi media sosial dalam mempercepat penyebaran informasi dan memungkinkan orang untuk menggalang opini kolektif (Muttaqin & Sriyono, 2021). Enam informan setuju bahwa proses ini tidak sehat karena mengabaikan musyawarah (deliberasi) dan keputusan yang didasarkan pada emosi. Dalam demokrasi yang ideal, ruang deliberatif yang matang diperlukan (Fadlan et al., 2020), di mana kebijakan dibuat melalui diskusi yang adil daripada tekanan emosional dari massa. Keputusan yang hanya mengikuti arus tanpa mempertimbangkan alasan jangka panjang dapat membuat kebijakan populer sesaat tetapi tidak bertahan lama (Sapitri, 2021).

Secara keseluruhan, meskipun media sosial menyediakan jalur partisipasi yang inklusif, ketika mekanisme ini menjadi faktor tunggal penentu keputusan, ia berpotensi merusak kualitas deliberasi dan menciptakan persepsi bahwa kredibilitas lembaga mudah digoyahkan oleh gejolak opini publik sesaat. Fenomena *governance by trending* adalah realitas baru dalam administrasi publik. Tantangannya bukan menghindari media sosial, melainkan bagaimana memanen kekuatan partisipasi digital tanpa mengorbankan kualitas, rasionalitas, dan kredibilitas lembaga pemerintah.

Kesimpulan

Dalam kasus perubahan keputusan PPATK terkait rencana pemblokiran rekening dormant, penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik di media sosial memicu fenomena *governance by trending*. Gelombang opini ini berfungsi layaknya *policy entrepreneur* yang mempercepat arus politik (*the political stream*) dan membuka jendela peluang (*policy window*). Tekanan digital tersebut menggeser arus masalah (*the problem stream*) dari isu pencegahan kejahatan siber menjadi persoalan ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat kecil.

Akibatnya, sebagian besar informan menilai keputusan PPATK bersifat reaktif dan terburu-buru, lebih untuk meredam kemarahan publik daripada hasil kajian rasional. Kondisi ini menurunkan kualitas formulasi kebijakan dan melemahkan proses deliberasi teknokratis. Kredibilitas PPATK pun dipersepsikan menurun karena dianggap tidak konsisten dan terlalu bergantung pada tekanan netizen. Walaupun media sosial dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, informan melihat dominasi opini digital sebagai mekanisme kebijakan yang tidak sehat karena mengabaikan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan mekanisme baru untuk menjaga kualitas proses deliberasi di era digital. *Pertama*, lembaga pemerintah perlu secara proaktif memasukkan analisis sentimen (*sentiment analysis*) dan pemantauan opini publik digital dalam proses kebijakan, sehingga potensi penolakan dan risiko sosial dapat diidentifikasi sejak awal. *Kedua*, penggunaan *policy sandbox* digital penting untuk menguji kebijakan dalam skala terbatas dan mengumpulkan umpan balik publik sebelum diterapkan secara luas. *Ketiga*, lembaga harus memperkuat komunikasi publik agar alasan teknis dan rasional kebijakan dapat dipahami, sekaligus menyeimbangkan tekanan politik berbasis emosi dengan penjelasan kebijakan yang lebih rasional.

Daftar Pustaka

- Alfathon, R. P., Fauzi Said, M., & Ilman Hakim, A. (2023). Analisis Agenda-Setting Policy Dalam Proses Penyelenggaraan Formula E Di DKI Jakarta. *Journal Of Politics And Policy*, 5(1), 40–57. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jppol.2023.005.01.04>
- Fadlan, M., Khaidir, A., & Eka Putri, N. (2020). Partisipasi Media Sosial untuk Mempengaruhi Kebijakan Publik pemerintah Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 49–57. <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/108/45>
- Fahmi, I. (2025, August 5). *Sentimen Publik Terhadap Pemblokiran Rekening Nganggur*. Drone Emprit. <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pemblokiran-rekening-nganggur/>

Firda, S., Heryani, S., Mutiara, B., Permatasari, N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–55. <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i6.324>

Grehenson, G. (2025, August 6). *Ramai Rekening Diblokir PPAK, Pakar UGM Sebut Kebijakan Kurang Matang*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/berita/ramai-rekening-diblokir-ppak-pakar-ugm-sebut-kebijakan-kurang-matang/>

Islamy, Muh. I. (2025). *Kebijakan Publik* (3rd Ed.). Universitas Terbuka.

Latifah, K. N., & Najicha, F.U. (2022). Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 494–501. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2525>

Muttaqin, M. Z., & Sriyono. (2021). Konstruksi Opini Publik Melalui Media Sosial: Studi Pendekatan Analisis Wacana Kritis Grup Facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura Pada Bulan Juni 2021. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 113–129. <https://doi.org/10.22225/Politicos.1.2.2021.113-129>

Prawira, M. R., Ardiputra, S., Hidayat, A. R., Artanti, A., & Dewi, N. (2022). Analisis Dampak Wacana Publik di Media Massa dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). *Mandar : Social Science Journal*, 1(2), 74–85. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/1776/873>

Rizqi, M. D., Saputra, W. A., & Murahman, M. (2023). Menggali Hubungan Antara Media Sosial Dan Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Kawistara*, 13(3), 389–401. <https://doi.org/10.22146/Kawistara.78591>

Sapitri, D. (2021). Agenda Setting Dalam Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur Sebagai Destinasi Wisata Sejarah. *Sostech : Jurnal Sosial dan Teknologi*, 1(2), 50–56. <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech>

Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik:Teori, Formulasi Dan Aplikasi* (A. Yanto, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Siregar, M., & Sukiman. (2024). Analysis Of Factors That Influence Public Policy. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 4(2), 159–167. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/HS/article/view/578>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (2nd Ed.). Alfabeta.

Yogyakarta, U. M. (2025, August 2). *Polemik Pemblokiran Rekening Dormant, Pakar UMY Sebut Bank Run Bisa Picu Krisis Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umi.ac.id/polemik-pemblokiran-rekening-dormant-pakar-umi-sebut-bank-run-bisa-picu-krisis-keuangan/>